

# PERAN MANGUNGGAL TNI-AD DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Kelurahan Sukur Kab. Minahasa Utara)

Oleh :  
MUHAMMAD FAIZAL RANGKUTI

*Hakikat Optimalisasi Peran TNI merupakan implementasi yang sangat konkrit dari tugas pokoknya terutama dalam Operasi Militer Selain Perang sesuai amanat dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di masa damai TNI tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer Bangsa lain maupun rongrongan dari dalam, namun juga atensinya dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nirmiliter/nonmiliter yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia. Hakekat kekuatan dan kemampuan TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat melaksanakan tugas untuk membantu pemerintah dalam proses percepatan pembangunan nasional dan membantu tugas pemerintah di daerah. Salah satu tugas nyata peran TNI sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 adalah membantu pemerintah memberdayakan rakyat melalui implementasinya dalam program Manunggal TNI. (Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial, disahkan dengan Skep Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007).*

*Program Manunggal TNI adalah merupakan kegiatan terpadu yang dapat dijadikan sebagai solusi ditengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat di daerah, karena kegiatan TNI Manunggal dalam pembangunan dapat menghemat anggaran pemerintah dalam pendanaan pembangunan. Walaupun kegiatan TNI Manunggal dapat dijadikan alternatif, namun sampai saat ini masih ada kesan bahwa kegiatan TNI dilaksanakan hanya bersifat sementara buktinya masih ada pemerintah daerah yang kurang merespon kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari seringnya keterlambatan dukungan kebutuhan dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa. Disisi lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunjang program Manunggal TNI AD yang senantiasa diupayakan untuk kepentingan rakyat.*

*Diberbagai wilayah di Indonesia ada banyak hasil nyata yang dibuat oleh TNI melalui program Manunggal khususnya di wilayah perbatasan selain menjaga keutuhan negara juga dapat memberdayakan masyarakat, melalui pembangunan fisik dan non fisik. Dalam program pembangunan fisik hasil nyata yang dibuat adalah membangun prasarana jalan desa yang dimaksudkan untuk dapat mempercepat pergerakan ekonomi rakyat. Pembangunan non fisik dapat diupayakan untuk membantu pemerintah bekerjasama dengan dinas PPL melakukan penyuluhan, membuka areal perkebunan petani Desa, menyebarkan bibit bahkan bahkan sampai kegiatan hasil panen bagi para petani.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pemikiran

Satu-satunya milik nasional yang tetap tidak berubah adalah TNI, demikian ucapan Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman salah satu sosok putera terbaik bangsa, yang selama hayatnya tak pernah ingkar terhadap perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan (Dian Andika Winda dan Efantino Febriana : 2009 : 13). Mengingat ucapan ini, menggugah Prajurit TNI untuk selalu tampil berkiprah dalam mempertahankan tiga faktor penting yang menjadi fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup atau eksistensi bangsa/negara, yakni kedaulatan negara yang harus tetap tegak, keutuhan wilayah NKRI yang harus tetap terjaga serta keselamatan bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia yang harus tetap terjaga. Sehingga konsep untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kelangsungan hidup bangsa Indonesia harus dirancang dengan jalan memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi dan kekuatan nasional secara komprehensif.

Sebagai wujud nyata dalam mengemban amanah tersebut, TNI telah berkiprah positif dan ikut memberi andil dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat direalisasikan dengan keberhasilan TNI dalam mendukung dan mengawal agenda demokrasi Pemilihan Umum, khususnya dalam puncak prosesi Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Keberhasilan tersebut tentu akan mendorong kesadaran Prajurit TNI khususnya TNI-AD dalam mengamankan keutuhan negara secara konsisten dan terpatir yang dibuktikan dengan sikap netralitas TNI terhadap politik praktis melalui nuansa reformasi dalam tubuh TNI. Sehingga TNI tidak lagi menjadi bagian dari atensi politik praktis serta membuktikan dirinya untuk selalu bersikap netral dalam kehidupan politik praktis.

Dengan keberhasilan tersebut, TNI tidak pernah berhenti untuk mengembangkan kreativitas dan perannya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, karena TNI menyadari sepenuhnya bahwa kemajuan pembangunan selama ini telah menempatkan bangsa Indonesia dalam keadaan yang aman dan lebih baik. Disanalah TNI berkiprah mengawal Bangsa ini dengan tetesan darah dan jiwa raganya demi Bangsa Indonesia melalui berbagai kebijakan pemerintah telah membuat program dan melaksanakan kegiatan pembangunan secara konsisten, terpadu dan bersifat lintas-sektoral dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan, serta koordinasi dan kerja sama yang solid antara Kementerian, Lem-

baga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Pemerintah Daerah. Dibalik keberhasilan tersebut maka peran TNI-AD masih perlu dioptimalkan agar mampu menyentuh masyarakat khususnya di daerah terisolir, daerah rawan, pulau terdepan dan daerah perbatasan darat antar negara yang merupakan beranda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka TNI sebagai salah satu komponen bangsa memiliki jati diri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional dapat berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa khususnya mengawal keutuhan wilayah NKRI.

Di masa damai TNI tidak saja sebagai kekuatan pertahanan yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia, tetapi juga atensinya adalah sebagai kekuatan untuk membantu pemerintah di dalam proses pembangunan nasional melalui tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sehingga tidaklah berlebihan jika TNI di samping sebagai kekuatan pertahanan juga berkiprah sebagai kekuatan moral dan kekuatan kultural, yang mampu mengangkat citra bangsa di kancah pergaulan internasional. Sumbangsih yang optimal TNI kepada bangsa dan negara, dimanifestasikan dengan kekuatan dan kemampuan serta fasilitas yang dimiliki melalui optimalisasi peran TNI dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan implementasi yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama lewat Kementerian dan Pemerintah Daerah dimanifestasikan terus menerus tanpa pamrih dengan semangat militansi dan dedikasi yang tinggi guna mencapai misi dan tujuannya.

Apa yang dibuat dalam program Manunggal TNI bagi kepentingan rakyat adalah semata-mata suatu bentuk gerakan moral dan fisik yang dimanifestasikan untuk memberikan pemberdayaan masyarakat secara tulus tanpa adanya unsur paksaan. Jadi ada banyak program Manunggal TNI-AD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat diantaranya melalui kegiatan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta pembangunan fisik dan lain-lain. Di wilayah Kelurahan yang termasuk dalam wilayah perkotaan peran TNI juga turut ambil bagian khususnya di Kelurahan Sukur, banyak kegiatan yang diimplementasikan dalam program Manunggal TNI, salah satu program rutin yang dicanangkan dalam program Manunggal TNI adalah program jumpa "PAS" yakni program yang dilaksanakan setiap hari

Jumat dimana tujuannya adalah memperhatikan alam sekitar. Tujuan memperhatikan alam sekitar adalah program aksi yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, kebersihan diri, bakti sosial, serta memupuk rasa persaudaraan diantara pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan program Manunggal TNI ini telah mendapat sambutan yang cukup baik dari pemerintah dan masyarakat.

Sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil pokok bahasan Skripsi dengan menitikberatkan pada: "Peran Manunggal TNI AD dalam Pemberdayaan Masyarakat suatu study di Kelurahan Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara".

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1). Bagaimana Peran Manunggal TNI-AD dalam Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Sukur ?.
- 2). Faktor-faktor yang menentukan Peran Manunggal TNI - AD dalam Pemberdayaan masyarakat ?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1). Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Peran Manunggal TNI-AD dalam Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukur.
- b. Mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang menentukan peran Manunggal TNI-AD dalam Pemberdayaan masyarakat.

### **2). Manfaat Penelitian**

#### **a). Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kelurahan khususnya dalam kaitan dengan pemberdayaan kepada masyarakat. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat.

#### **b). Manfaat Ilmiah.**

Dari segi Ilmiah hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu khususnya Ilmu Pemerintahan dalam memperkaya konsep-konsep Manunggal TNI AD dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan ref-

erensi bagi yang berminat dalam kegiatan penelitian ini.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Peran TNI Dalam Pembangunan**

#### **1. Optimalisasi Peran TNI**

Sesuai Peran TNI selalu mendasari atas amanah dalam peraturan perundangan-undangan dan doktrin-doktrin, sebagai arah pelaksanaan Peran TNI secara proporsional dan profesional. Pada dasarnya Peran TNI akan selalu bersumber pada latar belakang sejarah dan nilai-nilai budaya yang mengkristal menjadi falsafah atau dasar dan ideologi Pancasila serta konstitusi UUD 1945. (Hafid Sinambela : 2001 : 14).

Mengacu pada landasan tersebut, pada prinsipnya TNI akan selalu berkiprah dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yakni kedaulatan negara yang harus tetap tegak, keutuhan wilayah NKRI yang harus tetap terjaga serta keselamatan bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia yang harus tetap terjamin. Sehingga konsep untuk mempertahankannya dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan kekuatan nasional yang bersifat semesta, berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara (Pasal 27 UUD 1945) serta keyakinan pada kekuatan sendiri dalam upaya bela negara. (Hafid Sinambela : 2001 : 14).

Wujud implementasi peran TNI secara nyata telah ditunjukkan dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai langkah-langkah reformasi internal TNI yang telah diaktualisasikan terus menerus sesuai dinamikan perkembangan reformasi nasional, dengan mengedepankan cara pandang bahwa (1) apapun yang dilakukan TNI senantiasa dalam rangka pemberdayaan institusi fungsional, (2) TNI merupakan bagian dari sistem nasional, (3) apapun yang dilakukan TNI senantiasa dilakukan bersama komponen bangsa lainnya, TNI tidak berpretensi untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa, (4) segenap peran dan tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan atas kebijakan dan keputusan politik.

Berangkat dari cara pandang tersebut, maka TNI dalam menjalankan tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang) melakukan antara lain memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue). Penjabaran tugas

tersebut menggambarkan adanya kewajiban TNI membantu pemerintah dalam hal keikutsertaan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. (Hafid Sinambela : 2001 : 14).

TNI menyadari bahwa kemajuan pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia telah menempatkan bangsa Indonesia dalam keadaan yang lebih baik, dalam mencegah dan mengeliminasi permasalahan Nasional serta mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui berbagai kebijakan pemerintah dalam membuat program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektoral dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta koordinasi dan kerja sama yang solid antara Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan satuan kerja perangkat Daerah.

Namun demikian, untuk mendapatkan hasil pembangunan yang lebih optimal, maka masih diperlukan upaya sinergitas oleh seluruh unsur Pemerintah termasuk didalamnya TNI pada tataran pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang menyentuh masyarakat pada daerah terisolir khususnya daerah rawan, pulau terdepan dan pada daerah perbatasan darat antar negara yang merupakan beranda terdepan NKRI. (Hafid Sinambela : 2001 : 17).

Keinginan optimalnya hasil program pembangunan, sejalan dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya percepatan program Reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, dan prioritas lainnya di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian serta kesejahteraan rakyat.

Keterkaitan peran TNI dengan program pembangunan dalam proses pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat terlihat dari hakekat pemberian kewenangan otonomi daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan (*discretionary power*) kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, sehingga tujuan ini mengandung makna adanya perubahan kepada kehidupan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Selain itu juga adanya keinginan untuk mewujudkan terciptanya kehidupan berpemerintahan, ber-

masyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai *good governance* yang memunculkan nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat dan bangsa, serta bertanggung jawab (*akuntable*) kepada rakyat. (Kris-tiadi, J.B. 1995)

Dengan memahami makna terhadap tujuan otonomi daerah tersebut, maka dapat dipetik suatu kesimpulan hipotesis bahwa terdapat adanya konsep pemberdayaan dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bermuara untuk kepentingan keseimbangan pada aspek kesejahteraan dan keamanan. Untuk memahami makna pemberdayaan dapat diartikan ; Pertama, pada tingkat politik dan nasional, pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasa kita setiap hari sebagai *mechanism of self-help for people* (mekanisme bantuan diri bagi orang lain), Kedua, pada tingkat organisasi, pemberdayaan mempunyai daya tarik, yang selalu ada pencarian akan gagasan-gagasan dan konsep baru. (Alfitra Salam, 2007:24).

## 2. Peran TNI dalam Pembangunan

Menurut Arbi Sanit (2010 : 53) Secara sosial TNI (Militer) lebih mampu untuk menjadi modernisator sebab a). walaupun banyak anggota yang berasal dari daerah pedesaan, tetapi tentara atau TNI lebih cepat berkenalan dengan teknologi yang datang dari luar b), proses akulturasi didalam tentara (TNI) lebih mengarah kepada teknologi, dan c). secara politis , proses akulturasi tentara (TNI) lebih melibatkan diri kepada negara secara keseluruhan, daripada keterikatan kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti yang dialami oleh pengelompokan sipil.

Suasana pengalaman yang diperoleh didalam ketentaraan ini menyebabkan tentara (TNI) lebih terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan, terikat kepada penggunaan teknologi yang memang telah membawa perubahan besar didunia serta dikembangkan dan dimanfaatkan dengan kesungguhan mulai pada abad ke 17, dan lebih mampu melihat diri sendiri sebagai bagian dari masyarakat secara nasional daripada mengidentifikasi dari sebagian-sebagian. Itulah sebabnya maka tentara (TNI) terikat sekali kepada dua hal pertama, keutuhan nasional, dan kedua ialah kepada pembangunan. Oleh karena itu TNI memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Bagi TNI kegandrungannya kepada keutuhan nasional dapat diperhatikan dari sikapnya yang berkeberatan terhadap persetujuan-persetujuan yang dilaksanakan dengan Belanda sampai tahun 1950 (Lihat Arbi Sanit 2010 : 54). Sikap dan tindakan TNI terhadap percobaan untuk membentuk pemerintah



tandingan yang amat mungkin akan mengakibatkan terpecahnya Indonesia sebagai negara kesatuan seperti yang dilahirkan dalam bentuk DI, TIIIn PRRI/PERMESTA dan NIT, jelas pula menghindari perpecahan nasional, begitu pula dengan sikap TNI terhadap Pancasila sebagai Idiologi Negara, dan UUD 1945.

Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa politisi sipil tidak mempunyai rasa keterikatan kepada keutuhan nasional. Akan tetapi keterikatan kepada keseluruhan Indonesia itu, sering dikalahkan oleh keterikatan kepada unsur-unsur kesetiaan primordial. Sedangkan TNI yang lebih menjalani kehidupannya melalui organisasi dan pelembagaan serta disiplin yang dipusatkan kepada satu arah yaitu Indonesia secara keseluruhan, lebih terpisah daripada kesetiaan primordial.

Kemampuan TNI yang lebih tinggi untuk menjelaskan diri dari ikatan pengelompokan masyarakat inilah yang secara psikologis amat berpengaruh kepada kemampuannya untuk memelihara keutuhan nasional. Demikian pula terhadap pembangunan secara nyata adalah sukar untuk dipungkiri bahwa militer lebih terikat secara konsekuen kepada pembangunan.

Menurut Arbi Sanit (2010 : 55) ada beberapa faktor yang memungkinkan berkembangnya

## **B. Peran TNI-AD dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Salah satu tugas dan fungsi peran TNI-AD adalah melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Setiap anggota masyarakat akan membutuhkan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian pelayanan kepada masyarakat ini dilakukan oleh TNI-AD lewat prajurit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. TNI-AD sebagai pengemban misi negara dan misi pemerintah dalam semua aspek pembangunan juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Agar pembangunan dapat tercapai dengan baik maka TNI-AD sebagai pelaksana pembangunan teritorial harus mempunyai kemampuan dan kapasitas, sehingga dapat memberikan pemberdayaan yang berkualitas terhadap masyarakat.

Pemberdayaan sosial mencakup :

### 1). Bimbingan Sosial

- (a). Mengatasi masalah masalah lanjut usia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, khususnya keluarga.
- (b). Mengoptimalkan relaksasi antara sesama lanjut usia maupun dengan lingkungan sosial-

nya (keluarga dan komunitas sekitar lembaga pelayanan harian).Pmberdayaan ini dilakukan melalui bimbingan sosial individu dan bimbingan sosial kelompok dalam bentuk konseling, diskusi, permainan peran dan lain-lain.

### 2). Bimbingan psikososial

Bimbingan psikososial diarahkan untuk mengatasi masalah psikososial yang bersumber dari tekanan-tekanan emosional, psikologis dan lingkungan sosial lanjut usia, menurunkan kecemasan mereka dan masalah-masalah lainnya.Bimbingan psikososial dilaksanakan melalui kegiatan konseling, individu, kelompok dan keluarga.

Pemberdayaan masyarakat juga berkaitan dengan pelayanan Psikologis. Pelayanan ini terutama ditujukan untuk memperbaiki kondisi mental dan psikologis masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan.Pelayanan ini dilakukan melalui :

1. Pemberdayaankonsultasi psikologis.
2. Pemberdayaanrekrutmenusia dan lanjut usia potensial yang masih ingin bekerja.
3. Pemberdayaankonseling dan lain-lain.

### c. PemberdayaanKerohanian

Pemberdayaansosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi terhadap kasus yang muncul dan dilaksanakan secara diindividualisasikan, langsung dan terorganisasi serta memiliki tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai penyesuaian dan keberfungsian yang baik dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, yang terkandung dalam pelayanan dapat dikatakan adanya kegiatan-kegiatan yang memberikan jasa kepada klien dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan mereka.Pemberdayaan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

M. Fadhil Nurdin (2006:50), mengatakan bahwa Pemberdayaan sosial bukan hanya sebagai usaha memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial individu dan keluarga melainkan juga sebagai usaha untuk menjamin berfungsi kolektivitas seperti kelompok-kelompok sosial, organisasi-organisasi serta masyarakat. Menurut Alfred J. Khan yang telah diterjemahkan oleh

Soetarso (1993: 32-33), Pelayanan Sosial dibedakan dalam dua golongan, yakni :

1. Pemberdayaan sosial yang sangat rumit dan komprehensif sehingga sulit ditentukan identitasnya. Pemberdayaan ini antara lain pendidikan, bantuan sosial dalam bentuk uang oleh pemerintah, perawatan medis dan perumahan rakyat.
2. Pemberdayaan sosial yang jelas ruang lingkungannya dan pelayanan-pelayanannya walaupun selalu mengalami perubahan. Pemberdayaan ini dapat berdiri sendiri, misalnya kesejahteraan anak dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat merupakan suatu bagian dari lembaga-lembaga lainnya, misalnya pekerjaan sosial di sekolah, pekerjaan sosial medis, pekerjaan sosial dalam perumahan rakyat dan pekerjaan sosial dalam industry.

Pemberdayaan sosial dalam arti luas adalah setiap Pemberdayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia sedangkan dalam arti sempit ialah Pemberdayaan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak beruntung” (Dwi Heru Sukoco 2001:3)

Sementara itu menurut KEPMENPAN No. 63 tahun 2003, Pemberdayaan (termasuk pelayanan Publik) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemberdayaan adalah kegiatan pemenuhan keinginan dan kebutuhan/kepentingan masyarakat oleh penyelenggara Negara termasuk Pemberdayaan yang dilakukan TNI kepada masyarakat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Meleong, (1996) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrument yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya ( Alamiah) tanpa adanya seting-seting. Oleh karena

itu dalam penelitian kualitatif dapat diperlukan informan. Antara informan dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa informan penulis tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

### **B. Fokus Penelitian dan Penentuan Informan.**

Pengalaman peneliti adalah pengalaman yang sudah diketahui sebelumnya bahkan penulis sejak bertugas dalam wilayah teritorial sudah berada di Kelurahan tersebut. Kemudian dikelurahan ini sudah dilakukan berbagai aktivitas tentang peran Manunggal TNI AD terutama dalam memberikan Pemberdayaan masyarakat aplikasinya lewat bakti sosial dan bersih-bersih yang dilakukan secara rutin pada setiap hari Jumat. Penentuan focus dilokasi penelitian didasarkan pada pengalaman peneliti. Dalam penentuan focus suatu penelitian menurut Moleong (1996: 237) memiliki dua tujuan : Pertama, bahwa penetapan focus dapat membatasi study yang berarti dengan adanya focus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua bahwa penentuan focus secara efektif akan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi (memasukan dan mengeluarkan suatu masalah) untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Menurut Moleong (1996:237) satu hal yang perlu diperhatikan dan sekaligus perlu disadari oleh peneliti ialah focus penelitian mungkin saja berubah. Perubahan seperti itu bagi penelitian kuantitatif tentu sangat sukar diterima, sebaliknya bagi peneliti kualitatif hal demikian merupakan hal yang biasa bahkan sangat diharapkan. Penelitian kualitatif mengharapkan demikian karena akan terjadi tingkatan penelitian yang lebih dapat difahami dan dimengerti apa adanya.

Berkaitan dengan penentuan informan, maka sesuai dengan focus penelitian ini juga adalah masyarakat yang memiliki kepentingan dalam bidang Pemberdayaan yang menjadi informan termasuk informan kunci adalah Lurah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan sehingga penentuan Informan dapat ditetapkan sebanyak 5 orang.

### **C. Teknik Pengumpulan dan pengolahan data.**

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui :

1. Observasi/pengamatan.
2. Wawancara.
3. Data sekunder dan data primer.
4. Study Dokumen.

#### **D. Teknik Analisis Data.**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menganalisis, mendeskripsi, menggambarkan serta menguraikan berbagai peristiwa yang terjadi yang didapat dari pola wawancara dari para informan. Teknik analisis akan diuraikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Kegiatan Manunggal TNI-AD dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Diberbagai wilayah di Indonesia ada banyak hasil nyata yang dibuat oleh TNI melalui program Manunggal khususnya di wilayah perbatasan selain menjaga keutuhan negara juga dapat memberdayakan masyarakat, melalui pembangunan fisik dan non fisik. Dalam program pembangunan fisik hasil nyata yang dibuat adalah membangun prasarana jalan desa yang dimaksudkan untuk dapat mempercepat pergerakan ekonomi rakyat. Pembangunan non fisik dapat diupayakan untuk membantu pemerintah bekerjasama dengan dinas PPL melakukan penyuluhan, membuka areal perkebunan petani Desa, menyebarkan bibit bahkan bahkan sampai kegiatan hasil panen bagi para petani.

Dari landasan pemikiran tersebut diatas tidaklah berlebihan apabila program Manunggal TNI AD dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat melalui partisipasinya secara langsung dengan tanpa pamrih.

Apa yang dibuat dalam program Manunggal TNI-AD bagi kepentingan rakyat adalah semata-mata suatu bentuk gerakan moral dan fisik yang dimanifestasikan untuk memberikan Pemberdayaan masyarakat secara tulus tanpa adanya unsur paksaan. Jadi ada banyak program Manunggal TNI-AD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat diantaranya melalui kegiatan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta pembangunan fisik dan lain-lain. Di wilayah Kelurahan yang termasuk dalam wilayah perkotaan peran TNI-AD juga turut ambil bagian khususnya di Kelurahan Sukur, banyak kegiatan yang diimplementasikan dalam program Manunggal TNI-AD, salah satu program rutin yang dicanangkan dalam program Manunggal TNI-AD adalah program jumpa "PAS" yakni program yang dilaksanakan setiap hari Jumat dimana tujuannya adalah memperhatikan alam sekitar. Tujuan memperhatikan alam sekitar adalah program aksi yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, kebersihan diri, bakti sosial, serta memupuk rasa persaudaraan diantara pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan program Manunggal TNI-AD ini telah mendapat sambutan yang cukup baik

dari pemerintah dan masyarakat. Program Manunggal TNI-AD sebagai program aksi sosial antara lain melaksanakan kegiatan untuk mensukseskan sarana pembangunan jalan Tani di Kelurahan Sukur yakni pada beberapa lingkungan yang dilalui oleh para petani. Maksud dari pembangunan jalan Tani ini dilaksanakan untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat agar hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani dapat dijual secara cepat kepasar ataupun kepada para pedagang pengumpul. Sehingga Pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 Pemerintah bersama TN-AD melaksanakan kegiatan bakti sosial melaksanakan pembangunan jalan Lingkungan areal belakang untuk mendukung kegiatan pembangunan pertanian. Menurut Bapak A.T. beliau sebagai Ketua Penyuluh pertanian, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah bekerjasama dengan TNI-AD turut mendapatkan sambutan nyata dari masyarakat khususnya masyarakat petani. Alasannya karena program tersebut mendapatkan manfaat yang positif bagi masyarakat tani di Kelurahan Sukur. Hal senada dikemukakan oleh Lurah Sukur Ibu. Linda Pangaw S.Sos. bahwa peran TNI-AD khususnya Manunggal TNI AD telah memberikan manfaat nyata kepada pemerintah Kelurahan lebih khusus pula kepada masyarakat petani, karena selama ini salah satu faktor yang menghambat kegiatan usaha tani adalah buruknya Sarana jalan, namun dengan kehadiran Manunggal TNI AD telah memberikan manfaat yang sangat berarti bagi kami masyarakat di Kelurahan Sukur demikian apa yang disampaikan oleh Lurah Sukur.

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan berkaitan dengan Manunggal TNI-AD adalah kegiatan untuk mendukung usaha peningkatan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat Petani yakni melaksanakan kegiatan Sosial Ekonomi. Manunggal TNI-AD yang disponsori oleh TNI-AD Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan PPL, Pemerintah Kelurahan bersama para petani melaksanakan kegiatan penanaman Padi sawah, serta penanaman Jagung dan Bibit Cabe sebesar 4 Ha di areal pertanian Sukur di Areal belakang pertanian yang juga menjadi lahan dari milik petani Karel Tangkudung. diberikan kepada para petani untuk dapat digarap. Dengan program tersebut telah memberikan dorongan serta motivasi kepada petani dalam berusaha. Realisasi dari hasil kegiatan pertanian tersebut telah mampu merubah perilaku petani dalam berusaha.

Menurut Danny Christian. bahwa kegiatan Manunggal TNI AD telah mengingatkan pada masa-masa lalu seperti program ABRI masuk Desa program ini telah mendapatkan sambutan dari ma-

syarakat petani. Menurut Danny Christian juga yang mewakili Ketua Kelompok Tani di Kelurahan Sukur bahwa program manunggal TNI AD hendaknya menjadi bentuk percontohan kegiatan TNI AD di daerah lainnya sebab dengan kehadiran para Prajurit TNI AD telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat petani dalam berusaha. Perubahan nyata dari dampak peran Manunggal TNI AD bukan saja pada perubahan peningkatan pendapatan tetapi lebih dari itu adalah perubahan moral petani yang dulunya dianggap pasif kini mereka lebih kreatif dalam melaksanakan kegiatan usaha tani.

Menurut Wadanyonif 712/WT Mayor Inf Ridha Sitaba, mengatakan saat penulis mewawancarai mengatakan bahwa wujud implementasi Manunggal TNI AD secara nyata telah ditunjukkan dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai langkah-langkah reformasi yang telah diaktualisasikan terus menerus sesuai dinamika perkembangan reformasi nasional, dengan mengedepankan cara pandang bahwa (1) apapun yang dilakukan TNI-AD senantiasa dalam rangka pemberdayaan institusi fungsional, (2) TNI-AD merupakan bagian dari sistem nasional, (3) apapun yang dilakukan TNI-AD senantiasa dilakukan bersama komponen bangsa lainnya, TNI-AD tidak berpretensi untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa, (4) segenap peran dan tugas TNI-AD dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan atas kebijakan dan keputusan politik.

Berangkat dari cara pandang tersebut, maka TNI-AD dalam menjalankan tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang) melakukan antara lain memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue). Penjabaran tugas tersebut menggambarkan adanya kewajiban TNI-AD membantu pemerintah dalam hal keikutsertaan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

TNI-AD menyadari bahwa kemajuan pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia telah menempatkan bangsa Indonesia dalam keadaan yang lebih baik, dalam mencegah dan mengeliminasi permasalahan Nasional serta mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui berbagai kebijakan pemerintah dalam membuat program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektoral dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan

kelembagaan yang handal, serta koordinasi dan kerja sama yang solid antara pemerintah Daerah.

Namun demikian, untuk mendapatkan hasil pembangunan yang lebih optimal, maka masih diperlukan upaya sinergitas oleh seluruh unsur Pemerintah termasuk didalamnya TNI-AD pada tataran pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang menyangkut masyarakat pada daerah terisolir khususnya daerah rawan pangan. Kelurahan Sukur memang belum dapat dikatakan daerah rawan pangan namun demikian, wilayah ini masih perlu mendapatkan perhatian mengingat masih besarnya potensi lahan pertanian yang belum digarap oleh para petani. Kata Wadanyonif 712/WT Mayor Inf Ridha Sitaba bahwa kehadiran kami dalam pelaksanaan bakti sosial dari TNI-AD hanya sebagai pemberi motivasi namun kesemuanya itu kata kuncinya adalah tergantung pada para petani untuk mempertahankan kegiatan usaha Tani tersebut. Kami TNI-AD hanya sebagai motivator namun penerus kegiatan petani adalah tergantung dari pemerintah Kelurahan untuk mendorong serta keinginan dari para petani untuk melaksanakannya secara terus menerus.

Menurut Wadanyonif 712/WT Mayor Inf Ridha Sitaba bahwa pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan berpegang teguh pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya percepatan program Reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, dan prioritas lainnya di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian serta kesejahteraan rakyat.

Stabilitas keamanan dan kesejahteraan harus dibangun secara bertahap dan berkesinambungan, agar bangsa Indonesia memiliki suatu ketahanan pada semua aspek kehidupan. Cakupan keamanan dan kesejahteraan sangat dibutuhkan, terutama dalam mempersiapkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang harus terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga tata ruang pertahanan yang dibangun oleh TNI-AD melalui fungsi tugas pemberdayaan wilayah pertahanan memiliki ketangguhan dan aspek tangkal yang bersifat kewilayahan, dengan demikian pemaduan program pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan suatu keniscayaan.

Implementasi Peran TNI dalam membantu pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan pembangunan dilaku-



kan melalui kegiatan Pembinaan Teritorial dengan metode yaitu Bakti TNI -AD yang merupakan pendayagunaan kemampuan TNI terhadap obyek yang bersifat fisik, dan Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil) dalam rangka membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta Komunikasi Sosial (Komsos) dalam obyek membina kesadaran mental spiritual sebagai wujud pembinaan kehidupan dalam bermasyarakat.

Dengan Manunggal TNI-AD dalam membantu pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah merupakan partisipasi aktif TNI-AD dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus kontribusi TNI-AD dalam pembangunan nasional, dan dilaksanakan dalam bentuk bantuan personel, sarana maupun prasarana, maupun teknis terbatas sesuai kemampuan dan batas kemampuan TNI-AD yang disesuaikan dengan program kerja terkait yang dilaksanakan secara bertahap. Program Manunggal TNI-AD dalam kegiatan pertanian yang membantu masyarakat petani merupakan bentuk kegiatan percontohan dalam pembinaan teritorial TNI-AD khususnya dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial.

Dengan demikian dapat difahami bahwa kegiatan Manunggal TNI-AD kepada masyarakat adalah merupakan wujud nyata bentuk Pemberdayaan kepada masyarakat lewat bakti sosial, sebagaimana yang dikemukakan diatas. Peran TNI-AD dalam memberikan Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tulus tanpa pamrih maupun karena keterpaksaan tetapi peran TNI-AD dalam memberikan Pemberdayaan masyarakat adalah wujud nyata yang dilaksanakan secara terus menerus.

Selain bakti sosial dalam membantu kegiatan usaha tani TNI-AD juga membantu para penduduk dalam memberikan kesadaran untuk pengendalian kelahiran. Maka seringkali dalam setiap kesempatan Manunggal TNI-AD selalu memberikan penyuluhan kesehatan, penyuluhan program KB, lewat peran mereka melalui istri Prajurit TNI. Kegiatan penyuluhan ini juga membawa dampak yang positif kepada masyarakat khususnya bagi para ibu-ibu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan maupun program pengendalian kelahiran lewat program Keluarga berencana.

## **B. Faktor-faktor yang menentukan Peran Manunggal TNI-AD dalam Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Faktor Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat**

Selama ini banyak pihak yang meragukan ke-

giatan Manunggal TNI, pada hal kegiatan Manunggal TNI dilakukan untuk memaksimalkan pembinaan teritorial bagi wilayah yang dituju untuk meningkatkan perubahan terhadap kondisi fisik wilayah, kondisi sosial ekonomi, sosial budaya maupun kondisi keamanan. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kegiatan Manunggal TNI-AD hanyalah melaksanakan tugas pengamanan dalam suatu wilayah. Pada hal program Manunggal TNI-AD bukan saja melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap keamanan tetapi secara luas adalah meningkatkan kondisi fisik suatu wilayah serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan didalam masyarakat. Oleh karena itu banyak masyarakat yang kurang mendukung kegiatan dan program Manunggal TNI-AD, di lain pihak pemerintah daerah seringkali kurang memahami pentingnya program Manunggal TNI-AD. Untuk menunjang kegiatan dan program Manunggal TNI-AD maka diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat bersama TNI-AD. Karena dengan bentuk kerjasama seperti ini maka pelaksanaan program Manunggal TNI-AD akan dapat terlaksana dengan baik. Pentingnya kerjasama akan turut menunjang program pembangunan disuatu wilayah.

### **2. Faktor Peningkatan SDM Prajurit TNI-AD dalam menunjang pelaksanaan tugas**

TNI-AD sebagai pengemban amanat rakyat yakni sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan tentu memiliki pekerjaan yang berbahaya, memiliki risiko tinggi, dengan konsekuensi kemungkinan kehilangan nyawa sebagai akibat dari keputusan yang disengaja. Prajurit TNI-AD dituntut siap-siaga selama 24 jam terus-menerus dalam sehari disertai disiplin yang tinggi dengan kondisi tubuh yang harus prima dalam menghadapi setiap tugas. Namun modal itu tidaklah cukup bagi setiap Prajurit TNI-AD dalam mengemban tugasnya mengingat Era Globalisasi semakin terbuka sehingga akan membawa dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup bangsa, oleh karena itu setiap prajurit TNI-AD harus meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme berkaitan dengan pengembangan wawasan bagi setiap prajurit TNI-AD dalam melaksanakan tugasnya. Demikian pula dengan pelaksanaan program Manunggal TNI-AD, tanpa profesionalisme maka kegiatan Manunggal TNI-AD tidak akan dapat berhasil dengan baik. Kondisi faktual dilapangan menunjukkan bahwa profesionalisme Prajurit TNI-AD dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat belumlah optimal walupun sudah menunjukkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas mereka. Hal ini berkaitan dengan pengembangan wawasan dalam usaha men-

ciptakan setiap perubahan didalam masyarakat. Sebelum diterjunkan untuk melayani masyarakat maka setiap Prajurit TNI-AD perlu dibekali dengan pengetahuan ekstra seperti pembekalan, pelatihan yang mampu membina dan merubah prilaku serta sikap masyarakat dalam berusaha. Seorang anggota prajurit TNI-AD sebagian besar hanya mampu menguasai taktik perang tetapi untuk melaksanakan pembinaan teritorial hanya dimiliki oleh para perwira, karena perwira memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai, sedangkan yang bukan perwira wawasan pengetahuan mereka masih sangat terbatas. Contoh yang nyata bagaimana mungkin kegiatan Manunggal TNI-AD dapat terlaksana dengan baik kalau para prajurit dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan wawasan kepada para petani kalau para Prajurit tidak menguasai sistem usaha tani. Jadi proses pembekalan dan pembinaan prajurit TNI-AD dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit. Profesionalisme prajurit adalah pengembangan wawasan pengetahuan agar dapat direalisasikan secara nyata kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perubahan prilaku. Aksi Manunggal TNI-AD selama ini hanyalah bersifat bakti sosial sedangkan usaha pembinaan dan pengembangan wawasan belum banyak dilakukan. Selain profesionalisme prajurit maka diperlukan peningkatan jenjang pendidikan, karena dengan latar belakang pendidikan yang memadai maka secara langsung akan dapat meningkatkan profesionalisme prajurit.

Dengan demikian dapatlah difahami bahwa peningkatan SDM bagi para Prajurit TNI-AD dianggap penting dan menentukan.

### **3. Faktor Partisipasi Masyarakat dalam menunjang program Manunggal TNI-AD**

Pada dasarnya Partisipasi dapat dijumpai dalam berbagai kegiatan antara lain di bidang pemerintahan, kegiatan di bidang ekonomi dan di bidang sosial, dengan masing-masing bidang tersebut menuntut pola partisipasi yang berbeda. Di bidang pemerintahan, partisipasi masyarakat diatur dengan pengadaan lembaga-lembaga atau usaha menghidupkan dan mendinamisir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan masalah penetapan kebijaksanaan. Partisipasi dalam bidang kegiatan ekonomi menuntut ketrampilan, karena kegiatan partisipasi ini lebih menekankan pada menciptakan pengelolaan sumber-sumber ekonomi secara efisien agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan murah dan dengan mutu yang baik. Sebaliknya kegiatan partisipasi dalam bidang sosial, banyak timbul secara tidak formal yang kelompok-kelompok masyarakatnya

mempunyai perhatian dan minat yang sama yakni mempersatukan diri untuk melakukan suatu kegiatan sosial yang lebih menekankan pada masalah yang bersifat integrasi.

Pada masing-masing kegiatan partisipasi mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan orang lain, dan untuk memperhatikan kehidupan bersama di masyarakat. Partisipasi dari suatu organisasi menyangkut keikutsertaan orang-orang organisasi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan khususnya dikaitkan dengan suksesnya pelaksanaan pekerjaan organisasi itu sendiri. Sebaliknya partisipasi dari luar, biasanya lebih bersifat mengontrol, yang berusaha mengingatkan suatu organisasi tertentu apa yang hendak dicapai. Oleh karena itu kita sering mengasosiasikan partisipasi sebagai suatu kontrol (masyarakat), dapat pula bersifat turut membantu atau mendukung realisasi suatu program pemerintah.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi dalam bentuk sosial hanyalah merupakan salah satu dari banyak cara untuk memperbaiki kegiatan kerja, suatu sistem organisasi dan kontrol sosial ini biasanya, merupakan suatu usaha dukungan dan pengorbanan diri untuk mengisi kekurangan, menyumbangkan bersama-sama dengan anggota masyarakat demi kemajuan bersama atau, dengan kata lain, partisipasi harus berupa pengontrolan dan sekaligus pengabdian diri.

Seperti yang dikemukakan oleh Informan Serutu Sudirman. bahwa dalam menunjang kegiatan Manunggal TNI-AD maka diperlukan pentingnya partisipasi, sebab apapun yang dilakukan dalam kegiatan Manunggal TNI-AD namun tanpa didukung dengan partisipasi masyarakat maka program manunggal TNI-AD tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program Manunggal TNI-AD cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari adanya kerjasama masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial yang disponsori oleh para Prajurit TNI-AD. Dengan demikian dapat difahami bahwa partisipasi masyarakat dapat dianggap penting dan menentukan keberhasilan program Manunggal TNI-AD.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Tentara Nasional Indonesia adalah merupakan kekuatan dan ketahanan Nasional yang memiliki peran penting dan strategis. Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu bagian dari komponen bangsa berperan untuk membela dan men-

jaga keutuhan Negara. Kehadiran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mampu menciptakan kestabilan dibidang pertahanan dan keamanan Negara.

2. Kemanunggalan TNI-Rakyat, adalah suatu keadaan atau sikap perilaku yang menyatu dari atau bersatu padunya TNI-Rakyat, baik secara lahir maupun batin dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Program Manunggal TNI adalah merupakan kegiatan terpadu yang dapat dijadikan sebagai solusi dalam meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat di daerah, karena kegiatan TNI Manunggal dalam pembangunan mampu meningkatkan perubahan sosial dimasyarakat.
3. Diberbagai wilayah di Indonesia ada banyak hasil nyata yang dibuat oleh TNI melalui program Manunggal khususnya di wilayah perbatasan selain menjaga keutuhan negara juga dapat memberdayakan masyarakat, melalui pembangunan fisik dan non fisik. Dalam program pembangunan fisik hasil nyata yang dibuat adalah membangun prasarana jalan desa yang dimaksudkan untuk dapat mempercepat pergerakan ekonomi rakyat. Pembangunan non fisik dapat diupayakan untuk membantu pemerintah bekerjasama dengan dinas PPL melakukan penyuluhan, membuka areal perkebunan petani Desa, menyebarkan bibit bahkan bahkan sampai kegiatan hasil panen bagi para petani.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Manunggal TNI di wilayah kelurahan Sukur adalah sebagai berikut:
  - a. Bidang karya bhakti melalui program Jum-pa PAS telah mendapat sambutan dan hasil yang baik dari pemerintah dan masyarakat, terbukti dengan diraihnya piala Adipura oleh Kabupaten Minahasa Utara.
  - b. Bidang Olah raga berupa pelatihan sepak bola di Kipan B Yonif 712/WT memberikan hasil yang positif bagi peningkatan prestasi masyarakat di bidang olah raga.
  - c. Bidang Kesehatan terjalannya kerjasama Program Posyandu antara Persit ( Persatuan Istri prajurit ) dan masyarakat sekitar dengan petugas Puskesmas yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali bertempat di pos alamanda asrama kipan B yonif 712/WT yang berupa penimbangan balita, imunisasi, pelayanan ibu hamil dan konsultasi kesehatan, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
  - d. Bidang sosial lain melaksanakan kegiatan

untuk mensukseskan sarana pembangunan jalan Tani. Selain itu program Manunggal TNI-AD adalah kegiatan untuk mendukung usaha peningkatan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat Petani yakni melaksanakan kegiatan Sosial Ekonomi. Selain itu wujud nyata dari program Manunggal TNI-AD adalah melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial terutama dalam membantu pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan, tujuannya adalah merubah sikap, pola perilaku masyarakat secara umum dan masyarakat petani pada khususnya.

5. Faktor-faktor yang turut menentukan peran Manunggal TNI-AD dalam Pemberdayaan masyarakat antara lain, faktor Faktor Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat, Faktor Peningkatan SDM Prajurit TNI-AD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan faktor Faktor Partisipasi Masyarakat dalam menunjang program Manunggal TNI-AD.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka memberikan kontribusi yang optimal kepada bangsa dan negara, maka kekuatan, kemampuan serta fasilitas yang dimiliki TNI perlu didayagunakan melalui Optimalisasi Peran TNI yang implementasinya diwujudkan dalam kegiatan pembangunan disegala bidang.
2. Stabilitas keamanan dan kesejahteraan harus dibangun secara bertahap dan berkesinambungan, agar bangsa Indonesia memiliki suatu ketahanan pada semua aspek kehidupan. Cakupan keamanan dan kesejahteraan sangat dibutuhkan, terutama dalam mempersiapkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga tata ruang pertahanan yang dibangun oleh TNI-AD melalui fungsi tugas pemberdayaan wilayah pertahanan memiliki ketangguhan dan aspek tangkal yang bersifat kewilayahan, dengan demikian pemaduan program pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan suatu keniscayaan.
3. Implementasi Peran TNI dalam pelaksanaan program Manunggal diupayakan untuk membantu pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Melalui tulisan ini disarankan hendaknya semua pihak dapat bekerjasama dengan TNI-AD dalam mensukseskan program Manunggal TNI AD.
4. Keberhasilan program Manunggal TNI-AD akan dapat ditentukan oleh berbagai faktor diantaran-

ya faktor pengembangan Sumberdaya Manusia personel TNI-AD. Melalui tulisan ini disarankan hendaknya para pimpinan/petinggi TNI-AD dapat meningkatkan profesionalisme Prajurit, melalui peningkatan jenjang pendidikan.

5. Hendaknya masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mensukseskan program Manunggal TNI pada berbagai program kegiatan seperti program yang saat ini sedang digalakan antara Personel TNI bersama-sama dengan pemerintah Kelurahan TNI-AD adalah melaksanakan kerjabakti sosial yang diwujudkan dalam program Jumpa Pas. Melalui tulisan ini disarankan hendaknya pelaksanaan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara terus menerus.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arbi Sanit 2010, Sistem Politik Indonesia , Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Agus Dwiyanto, 2006 Penilaian Kerja Organisasi Publik. Makalah dalam Seminar Sehari : Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya. Fisipol UGM. Yogyakarta.

Alfitra Salam, 2007, Peran TNI manunggal dalam pembangunan Desa, Rosda karya bandung.

Badudu, 2001 , Otonomi Daerah dan Sektor Pelayanan Publik, Bumi Aksara Jakarta.

Dian Andika Winda dan Efantino Febriana : 2009, Rivalitas Wiranto Prabowo dari reformasi 1998 hingga perebutan RI – 1. Penerbit Bio Pustaka Jakarta.

Hafid Sinambela : 2001, Sistem Hankamrata, Penerbit PT Armico.

Ibnu Kencana dkk 1999, Manajemen Pelayanan terpadu, Penerbit Yayasan Obos Mas Jakarta.

Kurniawan 2005, Efektivitas Organisasi, Penerjemah Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.

Kristiadi, J.B. 1995, Dimensi praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia, STIA LAN Press.

Lukman Sampara 2000, Manajemen Kualitas Pelayanan, Penerbit STIA LAN ,Press.

-----,2008, Manajemen Sumberdaya Manusia, Penerbit STIA LAN Press.

Moenir 1997 Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.

Moenir.A.S. 2007, Manajemen Kinerja, Bumi Aksara Jakarta.

Moekijat,2006, Manajemen Sumberdaya, Penerbit PT Gramedia Jakarta.

M. Fadhil Nurdin, 2006, Kegiatan Pelayanan Sosial Pradnya Paramita.

Riant Nugroho,2008, Kebijakan Publik,Formulasi

Implementasi dan Evaluasi Penerbit PT Alex Media Kompetindo Kelompok Gramedia Jakarta.

Nugroho 2003 Kebijakan Publik,Formulasi Implementasi dan Evaluasi Penerbit PT Alex Media Kompetindo Kelompok Gramedia Jakarta.

Nugroho Riant ,2008, Kebijakan Publik,Formulasi Implementasi dan Evaluasi Penerbit PT Alex Media Kompetindo Kelompok Gramedia Jakarta.

Sarlito Wirawan, 2004, Bentuk Pelayanan Sosial Lansia, PT Gramedia Jakarta.

Sinambela, 2007 Pelayanan Umum di Indonesia, CV Rajawali Jakarta.

Yousa,2002 Manajemen Personalialia, , terjemahan Mohammad mas'ud. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Meleong, Lexy, 1996 Metodologi Penelitian Kualitatif Rosdakarya Bandung .

#### Sumber-Sumber Lain :

- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial, disahkan dengan Skep Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional,